

Transformasi pengembangan kurikulum pada tiga pilar pendidikan: madrasah, sekolah, dan pesantren

Lailatul Badriyah^{1*}, Nur Ahid², Nayla Fauzyah³
^{1,2,3}Pascasarjana, Institut Agama Islam Kediri, Indonesia

ABSTRAK

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 24 Juli 2025
Disetujui 12 Agustus 2025
Diterbitkan 30 Agustus 2025

Penulis Korespondensi*:

Lailatul Badriyah
Institut Agama Islam Kediri,
Indonesia
lela.bdriyh@gmail.com



©2025 Lailatul Badriyah, Nur Ahid, Nayla Fauzyah. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Artikel ini membahas transformasi pengembangan kurikulum di pesantren, sekolah, dan madrasah dari periode sebelum kemerdekaan Indonesia hingga era modern. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif (*descriptive qualitative*) untuk menggali perubahan yang signifikan dalam pendekatan pengajaran dan bagaimana setiap institusi merespons tantangan perkembangan zaman. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai evolusi kurikulum di tiga institusi pendidikan tersebut, serta menganalisis bagaimana kurikulum terus beradaptasi menghadapi digitalisasi, modernisasi, dan isu-isu moral yang kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum sekolah kini lebih menekankan pada proses pembelajaran yang interaktif dan menyeluruh, bukan hanya sekadar hasil akademik. Kurikulum madrasah juga telah bertransformasi menjadi lebih selaras dengan kurikulum nasional, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, pesantren tetap mempertahankan otonomi mereka dalam mengelola pendidikan, meskipun ada pengaruh regulasi politik yang mengatur dan meningkatkan perhatian terhadap kualitas pendidikan serta manajemen internal pesantren. Transformasi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pelestarian tradisi keagamaan dan kebutuhan menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan.

Kata Kunci: pengembangan kurikulum; pendidikan; sekolah; madrasah; pesantren

ABSTRACT

This article discusses the transformation of curriculum development in Islamic boarding schools (pesantren), regular schools, and madrasahs, spanning from the pre-independence period to the modern era. Using a library research method with a descriptive qualitative approach, the study explores significant changes in teaching methods and how each institution responds to the challenges of evolving times. The primary goal is to provide an in-depth understanding of the curriculum's evolution in these three educational institutions and analyze how it continues to adapt to digitalization, modernization, and complex moral issues. The findings indicate that school curricula now emphasize interactive and comprehensive learning processes rather than focusing solely on academic results. Madrasah curricula have also transformed to align more closely with the national curriculum, addressing societal needs. In contrast, pesantren maintain their autonomy in managing education despite the influence of political regulations, which have increased attention on educational quality and internal management. This transformation highlights the importance of balancing the preservation of religious traditions with the necessity of addressing the challenges of globalization in a rapidly changing world.

Keywords: curriculum development; education; school, Islamic school; boarding school

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk dapat memberikan bekal peserta didik dengan kompetensi maupun kemampuan *survival* dalam menjalani kebutuhan fungsional di masyarakatnya. Dalam prosesnya, pendidikan tidak hanya fokus mengembangkan potensi individu, tetapi juga membentuk kepribadian yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kualitas masyarakat sosial (Mubarak, 2016, p. 25). Melalui pendidikan, sebuah bangsa melakukan investasi untuk menentukan bentuk dan kualitas negaranya dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pendidikan dalam lembaga-lembaga yang dimilikinya.

Pendidikan di Indonesia memiliki unsur yang unik dan berbeda. Karena pendidikan di Indonesia tidak hanya memiliki satu lembaga pendidikan melainkan tiga lembaga pendidikan utama dengan karakteristik yang berbeda (Damanhuri & Yacub, 2024, p. 2). Tiga lembaga pendidikan utama di Indonesia yang diakui dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yakni sekolah, madrasah dan pesantren (Yahya, 2015, p. 94). Ketiga institusi tersebut merupakan lembaga yang saling menopang sebagai pilar pendidikan Indonesia, dan telah menjadi bagian integral dari pembangunan budaya dan sosial masyarakat. Hal ini tidak menjadikan pendidikan Indonesia menjadi semakin lemah, akan tetapi sebaliknya justru semakin kokoh karena diperkuat oleh tiga pilar sekaligus yang memiliki tujuan pendidikan nasional yang sama dengan kekhasan masing-masing.

Secara historis, lembaga pendidikan di Indonesia berangkat dari pesantren. Pesantren memiliki andil besar dalam menciptakan generasi emas. Hal ini tidak lepas dari peran pesantren dalam bidang pendidikan masyarakat maupun peran perlawanan terhadap kolonialisme bahkan peran politik pada era reformasi (Wahyuddin, 2016, p. 22). Akan tetapi, meskipun secara historis pendidikan pesantren telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Nur Cholis Majid masih menilai bahwa pesantren mampu mengimbangi tuntutan dan dinamika budaya kontemporer. Akibatnya, lulusan pesantren seringkali kurang mampu menghadapi tantangan kebutuhan global. Hal ini diperkuat oleh pandangan Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa alumni pesantren cenderung kurang siap menghadapi persaingan di dunia kerja (Chotimah & Nisa', 2020, p. 47).

Madrasah menjadi sebuah lembaga pendidikan relatif lebih muda dari pesantren yang sama-sama lahir sebagai lembaga pendidikan Islam (Haningsih, 2008, p. 32). Madrasah hadir merespon kegelisahan masyarakat atas kekhawatiran pendidikan Islam tradisional yang dilaksanakan pesantren kurang bisa menjawab kebutuhan pragmatis masyarakat, dan akan perkembangan pendidikan kolonialisme yang dikhawatirkan akan menyebabkan pemikiran sekuler (Adelia & Mitra, 2021, p. 34).

Lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal nasional di Indonesia yang dirancang untuk menjadi tempat peserta didik belajar mendapatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dilaksanakan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik yang dirancang melalui program pendidikan tertentu (Juanda, 2010, p. 8). Menurut Ki Hajar Dewantara program pendidikan di sekolah harus tetap didasarkan pada falsafah kebangsaan Indonesia (Mubarak, 2016, p. 37). Hal ini menunjukkan bahwa visi-misi pendidikan di sekolah harus tetap selaras dengan visi-misi Indonesia.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa tiga pilar pendidikan berbeda dari segi karakteristik lembaganya, akan tetapi memiliki tujuan pendidikan yang sama. Masing-masing lembaga memiliki keunggulan sistemnya sendiri. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa output dari masing-masing lembaga tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Misalnya di lembaga pendidikan sekolah hanya unggul di bidang pelajaran umum seperti sains dan sejenisnya (Yahya, 2015, p. 110) akan tetapi masih banyak ditemui lemah dalam karakter. Sebaliknya pada lembaga pendidikan Islam yakni pesantren dan madrasah yang fokus pendidikannya diarahkan pada pendidikan akhlak dan penguasaan gramatikal arab memiliki kelemahan terhadap kemampuan berpikir kritis (Humaidi & Fadhliyah, 2024, p. 238) dan kemampuan intelektual serta daya saing di dunia industri.

Kelebihan dan kelemahan pada masing-masing pilar pendidikan ini perlu dievaluasi.

Salah satu hal yang paling krusial dalam proses pendidikan adalah kurikulumnya. Hilda Taba, seorang pakar kurikulum dan pendidikan, dalam bukunya menyampaikan bahwa kurikulum pada dasarnya adalah cara untuk mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan budaya mereka. Karena telah disebutkan dalam bukunya *“curriculum is, after all, a way of preparing young people to participate as productive members of our culture”* (Taba, 1962, p. 1002).

Oleh karena itu, kajian-kajian mengenai kurikulum banyak dilakukan untuk memperoleh formula paling sesuai dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Amiruddin Siahaan dkk menjelaskan bahwa manajemen kurikulum merupakan suatu langkah penting yang digunakan sebagai media pengaturan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Siahaan et al., 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Azhari dalam artikelnya Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat) menjelaskan bahwa manajemen kurikulum menentukan mutu pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak akan berhasil apabila tidak diatur sesuai peran dan fungsinya masing-masing (Azhari, 2017).

Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, tercatat Indonesia telah melakukan berkali-kali perubahan kurikulum dari sebelum kemerdekaan hingga tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian tersebut disebutkan oleh Eka Paramita dkk dalam Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Paramita et al., 2025). Perubahan-perubahan kurikulum merupakan hal yang niscaya dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kurikulum yang ditulis oleh Indra Wahyuni Firli Angesatu dkk dalam artikel Perubahan dan Inovasi Kurikulum Pendidikan di Berbagai Negara misalnya di Kanada, ada perubahan kurikulum dari teoritis menjadi kurikulum yang menekankan berpikir kritis. Bahkan di Finlandia yang merupakan acuan kurikulum pendidikan di berbagai Negara juga memperoleh kurikulum berbasis pemecahan masalah setelah mengalami berbagai perubahan kurikulum salah satunya adalah kurikulum berbasis prestasi akademik (Fangestu et al., 2025, pp. 8–9).

Melihat hal ini, diperoleh kesimpulan bahwa respon dari masalah-masalah pendidikan salah satu kuncinya adalah pada kurikulum. Maka sangat penting untuk mendokumentasi dan mengkaji bagaimana pengembangan kurikulum yang pernah ada secara holistik dari tiga pilar lembaga pendidikan Indonesia, dengan harapan mendapatkan peluang untuk melakukan pengembangan maupun faktor kunci dari hal-hal yang perlu dievaluasi untuk menjadikan pendidikan di Indonesia baik dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Prosesnya melibatkan penelusuran berbagai sumber literatur, seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema yang dikaji. Literatur yang dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis dengan mengacu pada situasi dan kondisi aktual (2005, p. 60). Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam serta analisis yang kontekstual terhadap isu atau topik yang dibahas.

Melalui pendekatan analisis kajian kepustakaan akan diperoleh data-data dan literatur mengenai bagaimana pengembangan kurikulum yang dilakukan terhadap tiga pilar pendidikan di Indonesia. Temuan-temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik ini umumnya diterapkan dalam pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi makna yang tersembunyi dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena atau konteks yang sedang dipelajari (Ridwan et al., 2023, p. 104) untuk memberikan gambaran utuh mengenai tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya mengarahkan tujuan pendidikan, tetapi juga menjadi faktor penentu jenis serta kualifikasi lulusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, kurikulum menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan (Ansori, 2020, p. 42). Oleh karenanya kurikulum terus menerus dilakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas bangsa itu sendiri.

1. Transformasi Pengembangan Kurikulum

A. Pendidikan Sekolah

Pada saat penjajahan, sekolah-sekolah didirikan dengan sistem yang membedakan layanan pendidikan berdasarkan latar belakang sosial dan etnis. Anak golongan kolonial dan anak-anak pribumi menerima pendidikan yang berbeda sesuai dengan status mereka. Bagi golongan pribumi, layanan pendidikan juga dibedakan berdasarkan strata sosial, yaitu antara golongan rakyat biasa di lapisan bawah dan golongan priyayi yang dianggap lebih tinggi dalam struktur sosial. Sistem ini mencerminkan diskriminasi yang mempertahankan hierarki sosial pada masa itu (Insani, 2019, p. 47). Berangkat dari sejarah tersebut, hingga saat ini tercatat Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum (Yuliyanti et al., 2022, pp. 96–97) sebagai berikut:

a) Orde Lama (1945-1965)

1) Rentjana Pelajaran 1947

Sebagai kurikulum pertama, kurikulum 1947 didesain sebagai wadah untuk membangun rasa nasionalisme (Insani, 2019, p. 47). Sehingga pendidikan menitikberatkan pada pendidikan karakter dibandingkan aspek kognitifnya.

2) Rentjana Pelajaran Terurai 1952

UU No. 4 tahun 1950 mendasari pergantian kurikulum 1947 menjadi kurikulum 1952 (Insani, 2019, p. 48) yang dibedakan dengan mulai adanya tema-tema mata pelajaran. Sebelumnya pelajaran diberikan secara tanpa ada nama dari setiap tema yang mereka pelajari dalam kelas.

3) Rentjana Pendidikan 1964

Pada Rentjana Pendidikan tahun 1964 konsep pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran aktif, kreatif dan produktif. Pada tahun tersebut isu mengenai ketiga aspek di atas menjadi wacana yang cukup menarik untuk diadopsi dalam lingkungan pendidikan. Dampak dari kebijakan ini, kurikulum menekankan kewajiban peserta didiknya untuk mampu memiliki kemampuan pemecahan masalah. Pada kurikulum ini juga identik dengan ciri khasnya yakni Hari Krida setiap Sabtu (Insani, 2019, p. 49) yang mana pada hari tersebut kegiatan ditekankan pada kegiatan yang mengasah kreatifitas masing-masing siswa.

b) Orde Baru (1966-1998)

1) Kurikulum Sekolah Dasar 1968

Kurikulum ini adalah kurikulum terpadu pertama yang diterapkan di Indonesia. Dalam kurikulum ini, beberapa mata pelajaran, seperti Sejarah, dan berbagai cabang ilmu sosial, digabungkan menjadi IPS. Begitu pula dengan mata pelajaran seperti Ilmu Hayati dan Ilmu Pengetahuan Alam, kini digabungkan menjadi IPA. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempererat keterkaitan antar disiplin ilmu dalam pendidikan (Yuliyanti et al., 2022, pp. 99–100).

2) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik, di mana seluruh perencanaan dan pengembangan kurikulum dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekolah-sekolah hanya berperan sebagai pelaksana yang mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, tanpa memiliki banyak kebebasan dalam menentukan materi atau metode pengajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam sistem pendidikan di

seluruh Indonesia, namun juga membatasi fleksibilitas bagi guru dan sekolah dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal (Nur Halim, 2011, p. 73). Kurikulum 1975 mulai mewacanakan pendekatan proses dalam pelaksanaan pembelajaran.

3) Kurikulum 1984 Kurikulum 1975 yang Disempurnakan

Dalam pendekatan ini, meskipun proses pembelajaran menjadi fokus utama, faktor tujuan tetap dianggap penting. Subjek dalam pembelajaran ini adalah siswa, yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Model ini dikenal dengan istilah *active learning* di mana siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, melainkan terlibat dan berkontribusi terhadap kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan secara langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis dan bermakna.

4) Kurikulum 1994 (*Separate Subject Curriculum*)

Kurikulum 1994 merupakan tindak lanjut dari Sistem Pendidikan Nasional UU No.2 Tahun 1989. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan (Insani, 2019, pp. 52–53). Muatan lokal menjadi sangat banyak yang akhirnya kurikulum ini dinilai sangat padat.

c) Reformasi-Sekarang

1) Kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum ini belum diterapkan secara merata di semua sekolah di Indonesia (Nur Halim, 2011, p. 88). Beberapa sekolah dipilih untuk menjadi lokasi uji coba sebagai bagian dari proses pengembangan dan penyempurnaan kurikulum tersebut. Uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperoleh umpan balik, dan memastikan efektivitas kurikulum sebelum diterapkan secara luas di seluruh sekolah di Indonesia (Insani, 2019, p. 53). Dengan cara ini, diharapkan kurikulum yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

2) Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) Tahun 2006

KTSP mengadopsi konsep ide KBK sehingga KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP. Masih sama dengan yang ada dalam KBK, pada kurikulum 2006 guru dibebaskan untuk melakukan perubahan standar yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengembangan tersebut bisa dilakukan pada aspek tujuan, visi misi hingga silabus (Insani, 2019, p. 54). Akan tetapi kewajiban pokok seperti penerapan muatan lokal masih menjadi kebijakan yang sifatnya sentralistik (Nasir, 2013, p. 7). Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP atau dikenal Badan Standar Nasional Pendidikan yang juga akhirnya mengenal istilah KD, SK, SKL dan sejenisnya.

3) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pengembangan kompetensi yang mencakup tiga aspek utama: kompetensi berpikir, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum ini berfokus pada penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang saling terintegrasi, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, berinovasi, dan menunjukkan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari (Insani, 2019, p. 55). Isu teknologi dan moralitas menjadi salah satu alasan utama perubahan kurikulum ini.

4) Kurikulum Darurat 2020

Menyikapi pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan selama masa pandemi. Kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013 (Mubarak, 2016, p. 52), dengan tujuan untuk menyesuaikan pembelajaran yang efektif dalam situasi yang serba terbatas. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memfokuskan pada materi pokok yang paling esensial, agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh dan keterbatasan lainnya.

5) Kurikulum Prototipe 2021

Kurikulum ini berfokus pada pengembangan soft skills dan karakter, terutama yang berkaitan dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Prototipe bertujuan untuk memperkuat aspek-aspek penting seperti literasi dan numerasi, sambil membangun karakter dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan masa depan. Pembelajaran melalui proyek ini juga diharapkan dapat melibatkan peserta didik secara aktif, memberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kerja sama, serta nilai-nilai Pancasila dalam konteks Pendidikan (Mubarak, 2016, p. 53). Kurikulum prototipe adalah rancangan Kurikulum Merdeka.

6) Kurikulum Merdeka 2022

Hampir memanfaatkan sepenuhnya kurikulum 2013, dalam Kurikulum Prototipe, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan digunakan (Mubarak, 2016, p. 55). Hal ini memberi fleksibilitas bagi pendidik untuk memilih dan mengadaptasi materi pembelajaran yang paling relevan dan efektif bagi siswa, serta mempertimbangkan konteks lokal dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam menyusun pembelajaran yang lebih kontekstual, sekaligus memastikan bahwa tujuan pengembangan kompetensi, karakter, serta literasi dan numerasi tetap tercapai.

B. Pendidikan Madrasah

a) Era Orde Lama

Tidak ada perubahan signifikan pada masa orde lama dalam kurikulum madrasah karena seluruh program pendidikan diarahkan untuk pemberantasan buta huruf dan memperkuat identitas nasional Indonesia yang baru merdeka (Hasibuan, 2024, p. 92).

b) Era Orde Baru

Madrasah memfokuskan pendidikan keagamaan karena waktu itu mata pelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang tidak wajib. Selanjutnya, serangan G30 SPKI akhirnya memunculkan perhatian pemerintah terhadap madrasah (Tharaba, 2020, p. 143) sehingga muncul SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang menyetarakan status madrasah dengan sekolah umum (Tharaba, 2020, p. 144). Kebijakan ini diikuti oleh serangkaian regulasi yang semakin memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam sehingga PAI kembali menjadi mata pelajaran wajib.

c) Era Reformasi

Perubahan signifikan regulasi pendidikan madrasah terjadi sejak adanya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Undang-Undang ini mengakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, dan khusus (Nurlaeli, 2020, p. 629). Semenjak adanya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, madrasah mulai ikut menggunakan kurikulum nasional secara penuh. Sebagai konsekuensi Undang-Undang Kemenag membuat madrasah model untuk digunakan sebagai contoh bagi penerapan kurikulum nasional di madrasah-madrasah (Arifai, 2018, p. 16).

C. Pendidikan Pesantren

Pondok pesantren dari awal tidak memiliki kurikulum secara resmi, karena kurikulum pesantren merupakan kebijakan dari masing-masing pengasuh (Muhlas & Husnan, 2021, p. 277). Bahkan disebutkan bahwa kurikulum Pesantren adalah Kiai itu sendiri (Muhtifah, 2016, p. 204). Kurikulum pesantren secara umum terdiri dari empat bentuk. Pertama, pendidikan agama yang fokus pada pengajaran ilmu Islam. Kedua, pendidikan moral yang membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketiga, pendidikan umum yang mencakup mata pelajaran akademik seperti matematika dan bahasa. Terakhir, keterampilan dan kursus yang memberikan pelatihan praktis untuk pengembangan kemampuan siswa. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyeluruh, meliputi aspek spiritual, moral, akademik, dan keterampilan (Arifai, 2018, p. 13). Transformasi pendidikan pesantren secara umum adalah sebagai berikut.

a) Awal Kemerdekaan

Sebelum masa kolonial, pesantren melaksanakan program pendidikan dengan konsep dasar guru, murid dan bahan ajar yakni kitab. Dengan materi kajiannya adalah ilmu agama murni seperti nahwu, tasawuf, tauhid, hadits dan sejenisnya. Pesantren memiliki fleksibilitas yang tidak membatasi usia santrinya dalam menempuh pendidikan (Chotimah & Nisa', 2020, p. 53). Kemudian semenjak era kolonial, Pesantren menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan, sekaligus mempertahankan identitas keislaman di tengah kebijakan pendidikan kolonial yang sekular (Ahdar et al., 2021, p. 2).

b) Orde Baru – Orde Lama

Pada masa orde baru maupun orde lama, pendidikan pesantren belum mengalami perubahan yang signifikan mengingat belum adanya perhatian pemerintah secara khusus (Hayati et al., 2024, p. 256). Hal ini dikarenakan negara sedang dalam masa transisi dan peralihan serta isu ideologi bangsa. Pendidikan pesantren tetap dilaksanakan secara desentralistik sebagaimana jauh sebelum kemerdekaan pesantren telah melaksanakan pendidikannya.

c) Era Reformasi

Di era reformasi pesantren mulai banyak yang tidak mendikotomi materi pelajaran, beberapa pesantren bahkan mendirikan lembaga pendidikan umum yang berada di bawah Kemendikbud dan Kemenag (Chotimah & Nisa', 2020, p. 53). Hal ini dilakukan karena kurikulum sekolah berbasis pesantren diminati masyarakat (Rozi & Aminullah, 2021, p. 187). Peningkatan perubahan kurikulum ini dapat dilihat melalui otonomi pesantren dalam UU 19 Tahun 2019, yang memiliki konsekuensi penyetaraan, operasional pesantren, dan pendataan secara nasional. Bahkan data Kemenag menunjukkan pada tahun 2023 dari jumlah 23.497 pesantren, 39,96% nya tidak hanya mengajarkan pendidikan kitab tetapi juga integrasi keilmuan lainnya (2023).

2. Pengembangan Kurikulum Tiga Pilar Pendidikan

Kurikulum memang harus selalu berubah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Akan tetapi, dalam mengembangkan kurikulum tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Mubarak menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum sebagai berikut :

A. Prinsip Relevansi

Kurikulum bisa dikembangkan dengan tetap memperhatikan relevansi keluar dan ke dalam. Yakni kurikulum perlu dikembangkan menyesuaikan perkembangan pola kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan kesesuaian antara tujuan, isi dan penilaian (Mubarak, 2016, p. 28).

Melalui prinsip relevansi, konten dan materi kurikulum mengalami beberapa banyak revisi (Thamrin, 2018, p. 83) dan perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari kurikulum sebelumnya. Diantaranya adalah kontekstualisasi materi keagamaan, pengembangan moderasi, integrasi dan penguatan literasi digital.

Selain itu prinsip relevansi juga mempengaruhi metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum (Rozi & Aminullah, 2021, p. 77). Era digital menyebabkan metode pembelajaran yang digunakan juga banyak diarahkan melalui pemanfaatan teknologi digital, flipped learning hingga blended learning.

B. Prinsip Fleksibilitas

Adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel dan tidak kaku. Konsep integrasi menjadi salah satu contoh ide perubahan kurikulum yang fleksibel. Dengan mengintegrasikan kurikulum pesantren yang berfokus pada nilai agama dan moral dengan kurikulum nasional, diharapkan lulusan memiliki kecerdasan holistik dan siap menghadapi tantangan kehidupan modern (Kusumawati & Nurfuadi, 2024, p. 2).

C. Prinsip Kontinuitas

Prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum harus diwujudkan dalam setiap perubahan kurikulum yang dilakukan. Kesinambungan ini meliputi kesinambungan materi di jenjang sebelum dan selanjutnya (Mubarak, 2016, p. 29), juga kesinambungan proses pendidikan itu sendiri. Seperti contoh sistem evaluasi juga menjadi salah satu sasaran dalam perubahan kurikulum untuk menjaga kontinuitas proses pembelajaran. Dengan sistem evaluasi yang bagus akan memudahkan pemetaan kualitas pendidikan dan rencana perbaikan yang dibutuhkan.

D. Prinsip Praktis/Efisiensi

Perubahan kurikulum harus memaksimalkan penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang cukup. Sumber daya yang ada harus dimaksimalkan sesuai fungsinya.

E. Prinsip Efektivitas

Dalam dunia pendidikan, masalah efektivitas terus berusaha dikembangkan agar apa yang direncanakan dapat dilaksanakan untuk upaya mencapai tujuan (Mubarak, 2016, p. 28). Peningkatan kualitas lembaga melalui standarisasi, akreditasi dan sertifikasi adalah contoh dari usaha perubahan kurikulum yang dilakukan. Selain itu, akses pendidikan juga diperluas dengan akses beasiswa (Irsad, 2016, p. 50), pendidikan inklusif dan sejenisnya.

Pemaparan detail tentang bagaimana transformasi kurikulum pada tiga lembaga pilar pendidikan dilakukan, mulai dari sekolah, madrasah dan pesantren ini tentu dapat menjadi referensi yang holistik mengenai bagaimana perubahan kurikulum di Indonesia terjadi. Hasil temuan penelitian ini fokus terhadap dokumentasi perubahan kurikulum yang pernah dilaksanakan dibandingkan fokus terhadap upaya-upaya inovasi sebagaimana banyak ditemukan pada hasil temuan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan bukan untuk membatasi inovasi dan perkembangan kurikulum, melainkan sebaliknya menyajikan sejarah transformasi secara sistematis sehingga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai celah perkembangan kurikulum yang perlu diisi dan dilakukan evaluasi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan.

KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum baik di sekolah, madrasah dan pesantren telah mengalami banyak perubahan mulai dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Perubahan-perubahan tersebut diarahkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Perbedaan transformasi kurikulum antara ketiga pilar pendidikan di Indonesia terletak pada berbagai aspek. Kurikulum di sekolah mengalami perubahan substansi dari fokus kepada hasil dan tujuan kemudian dikembangkan pula untuk fokus terhadap proses. Sedangkan kurikulum madrasah mengalami transformasi yang cukup signifikan pada segi historis. Dari madrasah yang memiliki stigma rendah hingga saat ini kurikulum madrasah menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum nasional. Adapun kurikulum pesantren mengalami perubahan pada aspek keterlibatan regulasi politik yang mendukung pemenuhan kualitas dan fasilitas pesantren. Namun, untuk otonom penuh pada pengelolaan kurikulum tetap berada pada kebijakan mutlak masing-masing lembaga.

Selama ini, sistem pendidikan di Indonesia dalam lembaga sekolah, madrasah, dan pesantren cenderung berjalan secara parsial. Masing-masing lembaga beroperasi dengan karakteristik, orientasi, dan sistem yang terpisah, tanpa ada keterpaduan yang optimal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau inovasi yang lebih mendalam, tidak hanya untuk menganalisis dampaknya, tetapi juga untuk mengeksplorasi potensi jika ketiga model pendidikan tersebut dapat diintegrasikan. Upaya ini menjadi krusial dalam merumuskan sebuah sistem pendidikan yang lebih sinergis, relevan, dan adaptif dengan kebutuhan bangsa. Pada akhirnya, dengan mengintegrasikan keunggulan masing-masing lembaga, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, melahirkan generasi yang memiliki kompetensi utuh dan karakter yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832>
- Ahdar, A., Musyarif, M., & Abd.Rahman, Abd. R. (2021). Pemikiran Pendidikan Politik H.O.S Tjokroaminoto. *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 12(2), 69. <https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v12i2.305>
- Ansori, M. (2020). Pengembangan Kurikulum Madrasah Di Pesantren. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.32>
- Arifai, A. (2018). Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah dan Sekolah. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(2), 13–20. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.27>
- Azhari, M. (2017). Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat). *Analytica Islamica*, 6(2). https://search.crossref.org/search/works?q=2541-5263&from_ui=yes
- Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. (2023). Jumlah Pondok Pesantren Menurut Tipe. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pondok-pesantren-menurut-tipe>
- Chotimah, C., & Nisa', K. (2020). Pengembangan Kurikulum Pondok Pesantren. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 6(1), 45–68. <https://doi.org/10.55148>
- Damanhuri, & Yacub, J. (2024). Pranata-Sosial Pendidikan Islam di Indonesia: Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. *Islam Edu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.51614/islam%20edu.v2i01.447>
- Fangestu, I. W. F., Marpuah, S., Bahrissalim, & Fauzan. (2025). Perubahan dan Inovasi Kurikulum Pendidikan di Berbagai Negara. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v6i1.357>
- Haningsih, S. (2008). Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia. *el-Tarbawi*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art3>
- Hayati, S., Setyawan, R., & Hasibuan, Z. E. (2024). Pendidikan Islam Masa Orde Lama: Peran Ulama dan Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam. *Ahsani Taqim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(3), 254–270. <https://doi.org/10.63424/ahsanitaqwim.v1i3.108>
- Humaidi, A., & Fadhliyah, N. (2024). Analisis Perbedaan Proses dan Hasil Pendidikan Pesantren Salafiyah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Untuk Merumuskan Model Pendidikan Islam Transformatif. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 237–248. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.749>
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Irsad, M. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 1(2), 230–245.
- Juanda, J. (2010). Peranan Pendidikan Formal dalam Proses Pembudayaan. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a1>
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paramadina.
- Kusumawati, I., & Nurfuadi. (2024). Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(01), 1–7. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.293>

- Mubarak, R. (2016). Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. *Madrasah*, 6(2), 24. <https://doi.org/10.18860/jt.v6i2.3295>
- Muhlas, M., & Husnan, R. (2021). Manajemen Pengembangan Kurikulum Pesantren di Jawa Timur. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(2), 277–294. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i2.71>
- Muhtifah, L. (2016). Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren Kasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(2), 203. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507>
- Nasir, M. (2013). Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i1.12.1-18>
- Nur Halim, M. (2011). Analisis Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain dan Pendekatan). *Insania*, 16(3).
- Nurlaeli, A. (2020). Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Madrasah dalam Menghadapi Era Milenial. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana (S2) PAI Unsika*, 4(2).
- Paramita, E., Aminullah, A., Ratnasari, D., & Husna, A. (2025). Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 169–184. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.976>
- Ridwan, R., Hamzah, A., & Judrah, M. (2023). Pengembangan Kurikulum Pesantren Modern Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar. *Jurnal Al-Ilmi: Jurnal Riset Pendidikan Islam*, 3(02), 102–115. <https://doi.org/10.47435/al-ilmi.v3i02.1872>
- Rozi, F., & Aminullah, Moh. (2021). Inovasi Pengembangan Kurikulum Sekolah Berbasis Pesantren dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Manazhim*, 3(2), 183–200. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i2.1286>
- Siahaan, A., Supardi, S., Wardani, W., Fauzi, Z. A., Hasibuan, P. M., & Akmalia, R. (2023). Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal on Education*, 5(3), 9189–9196. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1723>
- Taba, H. (1962). *Curriculum Development; Theory and Practice*. Brace & World.
- Thamrin, Z. (2018). Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis. *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(1).
- Tharaba, M. F. (2020). Pesantren dan Madrasah dalam Lintasan Politik Pendidikan di Indonesia. *Managere : Indonesian Journal of Educational Management*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i2.25>
- Wahyuddin, W. (2016). Kontribusi Pondok Pesantren terhadap NKRI. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1).
- Yahya, F. A. (2015). Problem Manajemen Pesantren, Sekolah dan Madrasah: Problem Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output. *el-Tarbawi*, 8(1), 93–109. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art6>
- Yuliyanti, Y., Damayanti, E., & Nulhakim, L. (2022). Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia dan Perbedaan dengan Kurikulum di Beberapa Negara. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(3), 95. <https://doi.org/10.31000/lgrm.v11i3.7271>